

Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos

Shafrina Amalia

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Email: shafrinaamalia1106@gmail.com

Abstrak

Implementasi asset reform dan access reform senantiasa digalakkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Access reform diwujudkan dengan penyediaan akses bagi penerima manfaat reforma agraria terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah. Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos adalah suatu daerah yang memiliki potensi dibidang perikanan yang membutuhkan akses dalam mengembangkan hasil produktivitasnya.

Kata Kunci: *Reforma Agraria, Access Reform, Implementasi Kebijakan.*

Abstract

The implementation of asset reform and access reform is always encouraged to realize social justice for all Indonesian people. Access reform is realized by providing access for beneficiaries of agrarian reform to everything that allows them to develop their land as a source of life based on the potential that exists in each region. Fish Products Processing Group in Iwak Village, Mentaos Village is an area that has potential in the field of fisheries that requires access to develop its productivity.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Reform, Policy Implementation.*

PENDAHULUAN

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 mengenai Pembaruan Agraria Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) mendukung tujuan negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian juga mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria amankan asset reform (pengelolaan aset) dan access reform (pengelolaan akses) dalam rangka menjalankan misi tersebut. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN, 2021).

Reforma agraria merupakan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial ekonomi yang erat kaitannya dengan persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara mendasar dan menyentuh akar persoalan. Proses reforma agraria dibagi menjadi yaitu land reform (asset reform), yaitu suatu proses pembagian dan redistribusi tanah untuk mengatur pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan setempat. Serta, access reform yaitu proses menawarkan kepada penerima manfaat reforma agraria akses ke segala sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menggunakan tanah mereka sebagai sumber pendapatan, seperti dukungan keuangan, pasar, teknologi, bantuan, peningkatan kapasitas adalah pertimbangan lain (ATR/BPN, 2021).

Pelaksanaan access reform melibatkan kerjasama dengan pihak luar, seperti perbankan atau lembaga dan instansi hal-hal teknis tambahan. Penyedia fasilitas ini dipilih berdasarkan kemungkinan masing-masing wilayah, sehingga menghasilkan akses/fasilitas yang berbeda untuk setiap wilayah karena bergantung pada potensi masing-masing daerah. Kerjasama kelompok petani, instansi dan Kantah (Kantor Pertanahan), serta penyuluhan dan kesepakatan kerjasama, sangat diperlukan untuk mensukseskan aksi-aksi tersebut dalam urutan acara, mulai dari potensi daerah (Rohman, 2019).

Kesejahteraan yang dapat dilihat dari implementasi access reform adalah ketika adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan dari hasil produksi olahan para petani dengan memberikan kesempatan kepada sasaran reforma agraria untuk mengakses permodalan dan dukungan lainnya. Sehingga, adanya berubah ke arah yang baik dari kegiatan ini dan terciptalah pemberdayaan tanah masyarakat (ATR/BPN, 2021). Implementasi menurut Harsono (2002) adalah suatu implementasi berjalan dalam melakukan proses penyempurnaan akhir, kebijakan dalam penyelesaian keputusan dalam rangka mencapai tujuan yang baik. Namun, ditemukan di Indonesia masih banyak kegiatan implementasi yang gagal seperti yang dikutip dari berita online yoursay.id (2020) dimana teori tidak sama dengan yang ada di lapangan.

Hal ini sejalan dengan masih banyak ditemukan permasalahan implementasi access reform di salah satu penelitian diantaranya penelitian Rohman (2019) "Access Reform Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara" adalah judulnya. Ketidakefektifan antara filosofi reformasi akses, pemberdayaan masyarakat, dan persyaratan teknis pemberdayaan masyarakat setelah pengesahan aset menjadi isu bagi temuan studi ini. Fase komponen program belum sepenuhnya dibangun. Kampung iwak merupakan kampung penghasil ikan budidaya dan pengolahan hasil ikan budidaya. Tetapi untuk pemasaran, pengemasan produk, akses permodalan, pengurusan sertifikasi halal, ketersediaan alat dan sebagainya mereka masih terkendala sehingga kegiatan access reform Kantah Kota Banjarbaru memilih kelurahan Mentaos untuk dilaksanakannya kegiatan access reform dan kegiatan reform agraria meliputi (social mapping), tingkatan lembaga, mendampingi, tingkatan kemampuan, menempatkan teknologi, mengembangkan kegiatan, fasilitas ruangan, fasilitas promosi, dikuatkan data dan informasi, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Mentaos.

Dilihat implementasi kegiatan access reform harus mencapai tujuan reforma agraria yaitu mensejahterakan masyarakat dalam bidang keagrariaan. Berdasarkan permasalahan access reform, peneliti termotivasi untuk menyelidiki masalah Implementasi Access Reform Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos.

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dan Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Kampung Iwak. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu analisis tematik.

Alasannya peneliti memilih analisis tematik adalah karena analisis tematik bersifat sistematis dan memudahkan peneliti untuk mengasosiasikan seberapa sering munculnya tema-tema dengan keseluruhan data yang ada. Selain itu, analisis tematik juga membantu peneliti untuk menghubungkan

dan membanding berbagai konsep dan opini dengan data temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *Access Reform* Pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos

Tujuan dari reforma agraria adalah untuk memastikan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki akses terhadap keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Reforma agraria harus dilaksanakan secara terkoordinasi dengan inisiatif *access reform* dan *asset reform* untuk mencapai tujuannya meningkatkan kesejahteraan rakyat di sektor pertanian. *Access reform* dimana pemerintah memberikan fasilitas akses kepada masyarakat, merupakan salah satu kegiatannya. Dengan mendorong hasil produktivitas melalui pemberdayaan lahan masyarakat, implementasi reformasi akses diharapkan dapat menjembatani tuntutan masyarakat akan kesejahteraan.

Isi Kebijakan

Kepentingan-kepentingan berpengaruh

Kepentingan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang mempengaruhi kebijakan untuk dieksekusi. Menurut Grindle, potensi perubahan hubungan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Indikator ini menunjukkan bahwa implementasi suatu kebijakan harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, serta sejauh mana kepentingan tersebut berdampak pada implementasi tersebut. Suatu keputusan akan efektif jika ada dorongan luas dari masyarakat, yaitu khalayak yang dituju. Jika suatu kebijakan mewakili kepentingan kelompok sasarannya, ia akan mendapat dukungan luas dari kelompok itu, dan sebaliknya (Kasmad, 2013). Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) kegiatan *access reform* ini membawa perubahan yang baik pertama dalam hal ekonomi masyarakat dimana pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini diwujudkan dengan adanya inovasi yang diberikan dalam mengembangkan hasil produksi olahan ikan. Selain itu, dalam hal hubungan sosial kegiatan *access reform* ini juga membawa pengaruh yang baik dimana dengan kegiatan ini menjadikan sebuah langkah dalam memperkenalkan hasil daerah tersebut dan menjadi ciri khas untuk daerah Kampung Iwak.

Tipe Manfaat

Pelaksanaan kebijakan seperti inisiatif *access reform* yang telah dilakukan, diharapkan dapat menunjukkan atau menjelaskan bahwa harus ada berbagai manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan dari implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan menawarkan banyak manfaat perubahan pada hasil produktivitasnya, kebijakan itu dianggap berhasil. Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) masyarakat puas akan perubahan yang terjadi pasca kegiatan *access reform*. Terlebih perubahan dalam diversifikasi usaha mereka dari segi inovasi, alat produksi dan pemasaran. Namun, yang menjadi permasalahannya dalam hal pemasaran online yaitu masyarakat yang kesulitan dalam melanjutkan penggunaan aplikasi ini yang memang rata-rata keseluruhan anggota Kelompok Pengolahan Hasil Ikan ini berusia lebih dari 40 tahun yang masih belum sepenuhnya melek akan teknologi. Harapan masyarakat yaitu pemahaman lebih mendalam lagi mengenai penggunaan aplikasi e-commerce ini.

Dapat dilihat bahwa ada poin yang dirasa masyarakat masih kurang juga yaitu tidak adanya kegiatan pelatihan secara langsung mengenai pembuatan hasil ikan yang bervariasi hanya saja penyuluhan secara teori. Masyarakat mengharapkan cara pembuatan yang diajarkan oleh orang yang

ahli dibidangnya. Hal inilah yang membuat masyarakat sedikit kecewa dan menganggap inovasi yang diberikan tidak sepenuhnya berpengaruh dalam pengembangan produktivitas mereka.

Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Implementasi kebijakan, seperti inisiatif reformasi akses yang telah dilakukan, diharapkan dapat menunjukkan atau menjelaskan bahwa harus ada berbagai manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan dari implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan menawarkan banyak manfaat perubahan pada hasil produktivitasnya, kebijakan itu dianggap berhasil (Keban, 2013). Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) bahwa menjadikan nilai aset/lahan masyarakat menjadi lebih bertambah merupakan tujuan utama dari kegiatan access reform ini. Dimana diharapkan aset/lahan masyarakat yang sebelumnya tidak ada nilainya atau tidak digunakan untuk kegiatan usaha dibantu diberikan akses sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Sebagaimana tujuan dari reforma agraria adalah mensejahterakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan keagrariaan. Sehingga, derajat perubahan yang ingin dicapai dapat dikatakan sudah sesuai yang direncanakan.

Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sangat penting untuk implementasi suatu kebijakan, maka pada bagian ini perlu dijelaskan bagaimana pengambilan keputusan dari suatu kebijakan akan dilakukan. Pengambilan keputusan implementasi kegiatan access reform adalah posisi dari setiap pelaksana terhadap keputusan/kebijakan dalam mencapai tujuan access reform. Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) bahwa Kantah Banjarbaru dalam mencapai tujuan kegiatan access reform ini menjalankan keputusan/kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria jadi setiap tahapan kegiatan pun dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penanganan Reforma Agraria Tahun 2021. Artinya disini Kantah Banjarbaru sebagai pelaksana dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan keadaan di wilayahnya. Dalam mencapai tujuan kegiatan ini dibantu juga bersama pihak ketiga yaitu Dinas.

Pelaksana Program

Seorang pelaksana kebijakan yang berpengetahuan dan cakap diperlukan untuk keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program. Para pelaksana, atau yang kadang disebut sebagai pelaksana, harus memiliki keterampilan dan dedikasi yang kuat jika ingin kebijakan itu berhasil. Kapasitas pelaksana untuk menumbuhkan sikap profesionalisme (Keban, 2013). Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) dapat dilihat bahwa memang masyarakat kecewa dengan sikap ketidakdisiplinan Kantah Banjarbaru setiap ingin pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan. Implementasi access reform dalam kegiatan ini tidak tepat waktu dalam penyuluhan dan pendampingan. Hal ini yang membuat masyarakat menilai sikap pelaksana masih belum sepenuhnya profesional.

Sumber Daya yang Digunakan

Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan sukses, maka harus didukung pula oleh sumber daya yang mendukung. Ketersediaan sumber-sumber daya pendukung yang optimal dan memadai dalam pelaksanaan kegiatan access reform akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan access reform tersebut dalam membawa dampak perubahan. Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) dapat dilihat bahwa untuk SDM (Sumber Daya Manusia) dan finansial yang digunakan sudah baik. Dimana sumber daya manusia yang sudah optimal

dilihat dari para pelaksana yang sudah berkompeten. Lalu sumber daya anggaran atau finansial yang mana sudah tertera dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Selain itu, dari fasilitas pendukung lainnya yang dapat dikatakan sudah optimal misalnya fasilitas yang diberikan saat kegiatan penyuluhan/pendampingan yaitu kelengkapan pemberian konsumsi dan penunjang acara.

Lingkungan Kebijakan

Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

Untuk mendukung implementasi suatu kebijakan implementasi, penting untuk mempertimbangkan kekuatan atau kewenangan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat. Program yang akan dilaksanakan sangat mungkin tidak sesuai harapan jika tidak diperhatikan secara matang. Keberhasilan implementasi kegiatan access reform dapat dilihat apabila aktor masuk pelaksanaan kegiatan tersebut wewenang yang kuat dan jelas serta terarah.

Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) dapat dilihat bahwa wewenang dari pihak Kantah Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan kegiatan access reform ini mempunyai sebuah loyalitas keinginan yang kuat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan reforma agraria. Namun, yang menjadi masalah pihak Kantah Kota Banjarbaru tidak memiliki strategi tersendiri dalam pengimplementasiannya. Sebagaimana mereka hanya melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penanganan Reforma Agraria Tahun 2021.

Karakteristik Institusi

Bagian ini menjelaskan institusi yang akan berdampak pada suatu kebijakan karena lingkungan di mana suatu kebijakan dijalankan juga mempengaruhi keberhasilannya. Keberhasilan implementasi kegiatan access reform akan ditentukan pula oleh dukungan karakter pelaksana yang responsive. Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) dapat dilihat bahwa memang karakteristik dari Pihak Kantah Kota Banjarbaru ini responsif. Sebagaimana sesuai dengan 10 prinsip pelayanan publik yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyediaan sarana penerima saran dan kritik dari kegiatan access reform ini baik secara langsung dengan menyampaikan ke Field Staff ataupun secara online dengan media sosial.

Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana

Implementasi kegiatan access reform ini akan berhasil apabila sikap pelaksana yang selalu patuh dalam aturan yang tertera agar berjalan sesuai sasaran tujuan. Hasil penelitian jika dilihat menurut Grindle dalam (Keban, 2013) Kantah Banjarbaru dalam implementasi kegiatan access reform memiliki sikap kepatuhan yang baik karena menjalankan tugas sesuai dengan Tupoksi atau Job Description yang telah ditetapkan. Keseluruhan tanggung jawab dari pimpinan sampai petugas lapangan sudah tertera dalam Juknis pelaksanaan kegiatan access reform. Patuh disini mengartikan patuh terhadap aturan pelaksanaan. Serta mematuhi apa yang menjadi keputusan bersama dalam mencapai tujuan kegiatan access reform.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi *Access Reform* pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak dapat ditarik kesimpulannya yaitu secara keseluruhan pelaksanaan *access reform* pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Desa Iwak sudah berjalan dengan baik, meskipun beberapa di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan inisiatif *access reform* belum sepenuhnya tercapai. Hal

ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah harapan kelompok masyarakat yang belum terpenuhi. Dari sisi Grindle, masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan jenis manfaat, pelaksana program, dan taktik implementasi. Harapan besar dengan adanya kebijakan ini akan memberikan solusi atas permasalahan akses masyarakat.

Kelompok Pengolah Hasil Ikan di Kampung Iwak memberikan respon yang positif dan sangat antusias yang menjadi salah satu komponen pendukung dalam aksi reformasi akses ini. Kesadaran yang tinggi dari sejumlah instansi terkait juga diperlukan untuk melaksanakan implementasi agar berjalan sesuai peruntukannya. Faktor-faktor yang menghambat akses bantuan pemasaran *online* melalui media *e-commerce* *Shopee* dan *Instagram* adalah kurangnya kegiatan pembinaan untuk mengembangkan hasil produksi, kurangnya penyuluhan dan pembelajaran, kurangnya disiplin dalam pelaksanaan kegiatan *access reform* dan fakta bahwa masih belum ada strategi khusus yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan reformasi mengakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bunasim, Ahmad Syakrani. 2020. Tracing The Public Administration 4.0. Yogyakarta. Bildung.
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta. Grafindo Jaya.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. Studi Implementasi Kebijakan Publik. Makassar Kedai Aksara.
- Keban, Yermias, T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mardikanto, Totok; Soebiato, Poerwoko. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung. Alfabeta.
- Santoso, Djonet. 2019. Administrasi Publik Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sarman, Mukhtar, 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Banjarmasin: Pustaka FISIP UNLAM.
- Sohibuddin, Moh; Nazir Salim. M. 2013. Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria. Bogor. STPN Press.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafari, Muhammad Riduansyah. 2021. Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Banjarmasin. CEPP-ULM.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung. API Bandung.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
- Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2021 Kementerian ATR/BPN.
- Akbar, Mohammad. 2015. Principles of Implementing New Management and Governance in Administrative Reform. Vol. 5, No. 2.
- Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan. Volume 1 No. 1.
- Anida, Ana dkk. 2018. Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria Di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Vol. 4 No. 2.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2016. Access Reform Dalam Rangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Volume XXI No. 2
- Bawintil, Sinyo dkk 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Redistribusi Tanah Eks Erfpacht.
- Elfirawati. 2016. Implementasi Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Lalombi.

- Kurniawati, Festi. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. Vol. 2 No.3.
- Mutiarin, Dyah dkk. 2017. Public Policy In Theory And Practice.
- Nugraha, Qudrat. 2018. Manajemen Strategis. Modul 1.
- Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. Vol. 17 No. 33
- Rohman, Muhammad Luthfi. 2019. Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.
- Sulistyorini, Grinta Surya Devi. 2018. Pelaksanaan Access Reform Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- Sularna. Suranto, Joko. 2016. Implementasi Kebijakan Reforma Agraria Di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar (Studi Asset Reform dan Acces Reform).
- Syahyuti. 2004. Kendala Pelaksanaan Landreform Di Indonesia: Analisis Terhadap Kondisi Dan Perkembangan Berbagai Faktor Prasyarat Pelaksanaan Reforma Agraria.
- Yousay.id. 2020. Implementasi dan Hambatan Kebijakan Publik di Indonesia. <https://yoursay.suara.com/news/2020/11/18/130536/implementasi-dan-hambatan-kebijakan-publik-di-indonesia>, diakses pada 24 Maret 2022 pukul 20.15